

**ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP, PDRB  
PER KAPITA, DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI BANTEN**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**Lucky Selvandra Ariyus**  
**NIM. C2B009112**

**FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Lucky Selvandra Ariyus

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009112

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH ANGKA  
HARAPAN HIDUP, PDRB PER  
KAPITA, DAN JUMLAH  
PENGANGGURAN TERHADAP  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI  
PROVINSI BANTEN**

Dosen Pembimbing : Mayanggita Kirana, SE., M.Sc.

Semarang, 14 Agustus 2015

Dosen Pembimbing

(Mayanggita Kirana, SE., M.Sc.)  
NIP. 198605162010122007

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Lucky Selvandra Ariyus

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009112

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH ANGKA  
HARAPAN HIDUP, PDRB PER  
KAPITA, DAN JUMLAH  
PENGANGGURAN TERHADAP  
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI  
PROVINSI BANTEN**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 11 September 2015**

Tim Penguji :

1. Mayanggita Kirana, SE., M.Sc. ( ..... )
2. Drs. H. Edy Yusuf A G, M.Sc. Ph.D ( ..... )
3. Fitri Arianti, SE., M.Si. ( ..... )

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

Anis Chairiri. SE., Mcom., PhD., Akt  
NIP. 1967080919920310

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Lucky Selvandra Ariyus, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP, PDRB PER KAPITA, DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI BANTEN”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

(Lucky Selvandra Ariyus)  
NIM. C2B009112

## MOTTO dan PERSEMBAHAN

- **“Belajarlh dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari esok.  
Yang penting jangan berhenti bertanya”**
- **“Setiap orang yang banyak membaca tapi sedikit menggunakan akal nya  
sendiri akan menjadi orang yang pemalas”**
- **“Jika fakta tidak sesuai dengan teori, ubahlah fakta tersebut”**
- **“Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan”**
- **“Hidup itu ibarat naik sepeda; untuk menjaga keseimbangan, kau harus tetap  
bergerak”**
- **“Kebijaksanaan bukanlah hasil dari belajar di sekolah, tapi hasil dari usaha  
mendapatkannya selama hidup”**
- **“Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan kata hati, bahkan meski  
Negara memaksa melakukannya”**

**~Albert Einstein~**

*Skripsi ini Kupersembahkan Teruntuk Alm. Ayah dan Ibuku Tersayang.*

## ABSTRAK

Pembangunan ekonomi daerah merupakan tujuan utama dalam meningkatkan masyarakat daerah untuk mempunyai hidup yang lebih layak seperti masyarakat lainnya dan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Provinsi Banten merupakan daerah yang otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel Angka Harapan Hidup, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2012. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 dengan bantuan *software Eviews 4.1*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

**Kata Kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Angka Harapan Hidup, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran.**

## **ABSTRACT**

*Regional economic development is a major goal in improving local communities to have more decent life like other people and poverty is a complex problem that is often faced by developing countries such as Indonesia . There are a variety of interrelated factors , such as income levels , unemployment , health , education , access to goods and services , location, geography , gender , and neighborhood locations . Banten Province is an autonomous region formed under Law No. 23 of 2000. Before becoming the province of Banten part of West Java Province .*

*This study aims to analyze how and how much influence the life expectancy at birth , GDP per capita , and the number of unemployed to the number of poor people in Banten Province in 2012. The method of analysis in this study using multiple linear regression analysis with Ordinary Least Square method (OLS) which use data between space (cross section) District / Municipality in Banten Province in 2012 with the help of software Eviews 4.1*

*Results from this study indicate that the variable Participation Health significant negative effect on the number of poor people in the province of Banten , GDP per capita does not significantly influence the number of poor people in the province of Banten , and unemployment is positive and significant impact on the number of poor people in the province of Banten .*

**Keyword:** *Number of Poor People, life expectancy at birth, GDP per capita, and Total Unemployment*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP, PDRB PER KAPITA, DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI BANTEN*”. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Alm. Ir. H. Ariyus Arifin selama beliau hidup selalu memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini, hingga beliau meninggal penulis baru bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan Bunda tersayang Ida Daningsih yang selalu memberikan kasih sayangnya dan tidak ada hentinya atas dukungan, serta doa selama ini. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT akan membalasnya.
3. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Ibu Mayanggita Kirana, SE., M.Sc, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Firmansyah, SE., M.Si. Ph.D, selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi UNDIP.

6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kakakku tersayang Lilies Selvina, S.Psi beserta suami Fauzi Basyari S.Sn yang selalu memberikan dukungan dan doa yang telah engkau berikan dan selamat telah lahirnya Fahrezel Shankara Basyari tanggal 20 Juni 2015.
8. Semua teman-teman IESP '09, temen-temen kos Tarno Squad, temen-temen kos Wisma Sarjana dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan.
9. Leni Dyah Wardani yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta memasak makanan yang enak sehingga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 14 Agustus 2015

Penulis

Lucky Selvandra Ariyus

NIM. C2b009112

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Definisi dan Ukurn Kemiskinan.....	18
2.1.2 Indikator Kemiskinan .....	21
2.1.3 Penyebab Kemiskinan .....	24
2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan.....	24
2.1.5 Angka Harapan Hidup .....	27
2.1.6 PDRB Per Kapita .....	28
2.1.7 Pengangguran .....	30

2.1.8	Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin .....	33
2.1.9	Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin .....	33
2.1.10	Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	34
2.2	Penelitian Terdahulu .....	35
2.3	Kerangka Pemikiran .....	44
2.4	Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian .....	47
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	50
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	51
3.4	Metode Analisis .....	51
3.4.1	Analisis Regresi .....	51
3.4.2	Uji Asumsi Klasik .....	53
3.4.3	Uji Stastik .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b>		
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian .....	61
4.2	Stastistik Deskriptif .....	63
4.2.1	Tingkat Kemiskinan .....	63
4.2.2	Angka Harapan Hidup .....	65
4.2.3	PDRB .....	66
4.2.3	Tingkat Pengangguran .....	68
4.3	Hasil Analisis .....	70
4.3.1	Uji Asumsi Klasik .....	70
4.3.2	Model Regresi .....	75
4.4	Intepretasi Hasil .....	78

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	80
5.2	Saran.....	80
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	81
5.4	Implikasi.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	82
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	89
	<b>Lampiran A</b> .....	90
	<b>Lampiran B</b> .....	96

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota tahun 2012.....	4
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012 .....	6
Tabel 1.3 Persentase Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012.....	9
Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2012 .....	10
Tabel 1.5 Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2012 .....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 4.1 Deskripsi Kemiskinan di Banten Tahun 2002-2012 .....	64
Tabel 4.2 Angka Harapan Hidup di Banten Tahun 2002-2012 .....	65
Tabel 4.3 Deskripsi Produk Domestik Regional Bruto di Banten Tahun 2002-2012 .....	66
Tabel 4.4 Deskripsi Angka Pengangguran di Banten Tahun 2002-2012 .....	67
Tabel 4.5 Auxiliary Regression .....	70
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Breusch-Godfrey</i> (BG) Pada Model Kemiskinan....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser Pada Model Kemiskinan .....	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi LSDV .....	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Model .....	73

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier .....	25
Gambar 2.2 Lingkaran Kemiskinan dari Nurkse .....	26
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran .....	45
Gambar 4.1 Peta Provinsi Banten .....	62
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten .....	65
Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten .....	66
Gambar 4.4 PDRB per Kapita di Provinsi Banten .....	68
Gambar 4.5 Pengangguran di Provinsi Banten .....	69
Gambar 4.6 Uji Normalitas Jarque Bera .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran A Data .....</b>	<b>90</b>
<b>Lampiran B Data Sudah Diolah .....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan tujuan utama dalam meningkatkan masyarakat daerah untuk mempunyai hidup yang lebih layak seperti masyarakat lainnya dan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya meningkatkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus lebih memanfaatkan sumber daya yang telah ada untuk menaksir sumber daya yang diperlukan mampu menaksir potensi yang ada untuk merancang dan membantu membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004). Menurut Todaro (2006), proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Indonesia adalah Negara yang besar dalam banyak hal seperti luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan Indonesia juga memiliki penduduk miskin yang besar pula. Kemiskinan merupakan masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang telah merdeka sejak tahun 1945. Dengan persoalan kemiskinan ini yang menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan

dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian yang khusus masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karna lapangan pekerjaan yang minim dan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah dalam memenuhi perlindungan terhadap masyarakat miskin yang menyebabkan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan mereka secara keterbatasan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima fungsi pokok yaitu:

1. Perbaikan secara progresif daripada kondisi-kondisi kehidupan orang.
2. Pengembangan sumberdaya manusia.
3. Berorientasi manusia terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
4. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsi dalam pelayanan yang terorganisir lainnya.

Provinsi Banten merupakan daerah yang otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.632.166 jiwa setelah pemekaran. Dengan prosentase 67,01% penduduk perkotaan dan 32,99% penduduk pedesaan. Di Provinsi ini, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,78% /tahun dengan kepadatan 1.100 jiwa /km<sup>2</sup>. Dapat di lihat dari Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Banten**  
**Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2000</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pandeglang	1.011.788	1.149.610	1.172.179	1.181.430
Lebak	1.030.040	1.204.095	1.228.884	1.239.660
Tangerang*	2.781.428	2.834.376	2.960.474	3.050.929
Serang**	1.652.763	1.402.818	1.434.137	1.448.964
Kota Tangerang	1.325.854	1.798.601	1.869.791	1.918.556
Kota Cilegon	294.936	374.559	385.720	392.341
Kota Serang	...	557.785	598.407	611.897
Kota Tangerang Selatan		1.290.322	1.355.926	1.405.170
Banten	8.096.809	10.632.166	11.005.518	11.248.947

Sumber : BPS Provinsi Banten

Note : \*) Tahun 2009 termasuk Kota Tangerang Selatan

\*\*) Tahun 2008 termasuk Kota Serang

Menurut Tabel 1.1 diatas Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya sebelum dan sesudah pemekarannya Kota Tangerang Selatan, penduduk Kabupaten Tangerang meningkat sebesar 1,9% pada tahun 2000 sebesar 2.781.428 jiwa menjadi 2.834.376 jiwa di tahun 2010.

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu Provinsi Banten juga mempunyai masalah seperti dengan Provinsi lainnya yaitu kemiskinan yang terdapat di penduduknya setelah pemekaran yang dilakukan Provinsi Banten untuk lepas dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Pemerintah Provinsi Banten menetapkan program desa terpadu sebagai program unggulan tahun 2015 dalam rangka penuntasan kemiskinan di Banten. Seluruh program pengentasan kemiskinan mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota akan disinergikan dan dikelola secara terpadu. Berbagai program yang disiapkan seperti Jaminan sosial rakyat Banten

bersatu (Jamsosratu), beda rumah, dan lainnya dilakukan secara sinergi melalui desa terpadu. Terdapat sembilan isu strategis dengan keterkaitan program prioritas pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2015 antara lain, prioritas perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten yang masih berada pada angka 5,8% penduduk miskin.

Adapun data jumlah dan pertumbuhan penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten setelah terjadi pemekaran dapat di lihat dari Tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**  
**Tahun 2003-2012**  
**(Jiwa)**

	<b>Kab. Pandeglang</b>	<b>Kab. Lebak</b>	<b>Kab. Tangerang</b>	<b>Kab. Serang</b>	<b>Kota. Tangerang</b>	<b>Kota. Cilegon</b>
2003	161121	144393	244326	170069	75817	14905
2004	146440	132423	222834	153413	65133	13400
2005	150109	137288	221017	179587	85064	14477
2006	147342	142922	248387	166790	79430	21776
2007	174410	167472	219190	168352	77756	16854
2008	142114	142472	230135	117222	67543	24563
2009	138068	127995	206894	79551	73239	23727
2010	131056	124985	203508	88939	80218	25770
2011	131284	113057	254262	80742	74418	23683
2012	109519	106859	174208	76505	73097	21775

Sumber : BPS Provinsi Banten

Keterangan: \*) Tahun 2009 termasuk Kabupaten Tangerang

\*\*) Tahun 2008 termasuk Kabupaten Serang

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin pada beberap Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Banten mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukkan kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang meningkat cukup tinggi antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebesar 0,93%, angka tersebut di dapat setelah pemekaran dan terbesar selama 12 tahun terakhir ini. Beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk

miskin yang semakin meningkat selama periode tersebut, yaitu pada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya

jumlah penduduk miskin. Salah satu tolok sumber pengukuran IPM adalah ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator IPM adalah angka harapan hidup (AHH). Pemerintah daerah mengeluarkan dana pembangunan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk sehingga diharapkan memiliki penduduk dengan kualitas yang lebih baik. Berikut ini adalah perkembangan di sektor kesehatan dilihat pada Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota di Propinsi Banten

**Tabel 1.3**  
**Angka Harapan Hidup**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**  
**Tahun 2002-2012**

	<b>Kab. Pandeglang</b>	<b>Kab. Lebak</b>	<b>Kab. Tangerang</b>	<b>Kab. Serang</b>	<b>Kota. Tangerang</b>	<b>Kota. Cilegon</b>
2002	62.00	62.40	64.30	61.00	68.00	68.20
2003	62.10	62.60	64.50	61.40	68.00	68.30
2004	62.20	62.70	64.60	61.60	68.10	68.40
2005	62.30	62.80	64.90	61.70	68.20	68.40
2006	62.90	63.00	65.10	61.80	68.20	68.45
2007	63.10	63.10	65.30	62.30	68.20	68.50
2008	63.30	63.10	65.40	62.70	68.30	68.50
2009	63.50	63.21	65.61	63.08	68.33	68.53
2010	63.80	63.28	65.79	63.51	68.37	68.58
2011	64.00	63.35	65.90	63.88	68.41	68.62
2012	64.13	63.42	66.01	64.25	68.44	68.67

Sumber: BPS, Provinsi Banten Dalam Angka 2002-2012

Keterangan: \*) Tahun 2009 termasuk Kabupaten Tangerang

\*\*) Tahun 2008 termasuk Kabupaten Serang

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa besarnya angka harapan hidup pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2002 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa alokasi APBD untuk peningkatan IPM sudah dilakukan melalui peningkatan angka harapan hidup.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Berikut disajikan data perkembangan dan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten :

**Tabel 1.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Banten Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2002-2013**  
**(Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Kab. Pandeglang</b>	<b>Kab. Lebak</b>	<b>Kab. Tangerang**</b>	<b>Kab. Serang***</b>	<b>Kota. Tangerang</b>	<b>Kota. Cilegon</b>
<b>2002</b>	2.919,60	2.943,83	13.489,98	7.089,01	17.888,27	7.723,22
<b>2003</b>	3.052,87	3.046,91	14.401,07	7.317,28	18.987,72	8.281,37
<b>2004</b>	3.211,07	3.170,53	15.323,65	7.638,40	20.079,27	8.886,74
<b>2005</b>	3.398,59	3.289,22	16.445,46	7.973,37	21.462,17	9.440,71
<b>2006</b>	3.510,27	3.392,78	18.735,00	8.357,68	22.932,60	9.972,85
<b>2007</b>	3.667,47	3.559,03	19.974,01	8.785,79	24.505,12	14.706,00
<b>2008</b>	3.824,27	3.703,58	21.207,87	9.172,97	26.066,99	15.461,00
<b>2009</b>	3.985,78	3.855,54	22.329,96	9.521,64	27.562,53	16.246,80
<b>2010</b>	4.321,10	4.152,20	23.927,40	10.019,30	29.402,86	17.111,20
<b>2011</b>	4.554,60	4.419,50	25.766,20	10.650,80	31.469,90	18.228,70
<b>2012*)</b>	4.803,37	4.607,59	27.255,37	11.250,28	33.428,91	19.470,57

Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2002-2013

Keterangan: \*) Angka Sementara

\*\*) Tahun 2009-2012 termasuk Kota Tangerang Selatan

\*\*\*) Tahun 2008-2012 termasuk Kota Serang

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa PDRB per kapita seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2002 sampai tahun 2012 mengalami kecenderungan yang meningkat. Selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangerang Selatan setelah mengalami pemekaran pada tahun 2009) mencapai 27.255,37 rupiah pada tahun 2012. Sedangkan PDRB terendah pada tahun 2012 yaitu terdapat pada Kab. Lebak sebesar 4.607,59 rupiah.

Selain faktor-faktor di atas, adapula indikator lain yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan

kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Berikut ini disajikan data jumlah dan pertumbuhan pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pengangguran (jiwa)**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**  
**Tahun 2002-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Kab. Pandeglang</b>	<b>Kab. Lebak</b>	<b>Kab. Tangerang*</b>	<b>Kab. Serang**</b>	<b>Kota. Tangerang</b>	<b>Kota. Cilegon</b>
<b>2002</b>	76.440	83.227	97.349	80.985	29.036	9.467
<b>2003</b>	77.907	69.270	116.819	85.034	31.886	7.904
<b>2004</b>	69.661	62.265	107.084	75.283	27.776	6.518
<b>2005</b>	70.268	63.295	104.303	86.522	29.102	8.184
<b>2006</b>	80.032	74.935	115.151	78.919	42.493	7.358
<b>2007</b>	79.121	74.317	99.853	78.258	32.616	6.945
<b>2008</b>	63.489	62.059	103.051	53.549	45.277	5.824
<b>2009</b>	60.757	54.746	91.091	47.930	43.426	6.105
<b>2010</b>	65.527	62.492	101.754	44.469	61.871	8.352
<b>2011</b>	57.436	56.528	95.031	40.370	57.402	8.601
<b>2012</b>	54.759	53.429	87.104	38.252	53.156	7.474

Sumber: BPS, Provinsi Banten

Keterangan: \*) Tahun 2009 termasuk Kabupaten Tangerang

\*\*) Tahun 2008 termasuk Kabupaten Serang

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas terlihat bahwa jumlah pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 mengalami fluktuasi. Banyak daerah yang mengalami peningkatan angka pengangguran di tahun 2006 .

Jumlah pengangguran tertinggi pada tahun 2006 di Kabupaten Tangerang sebesar 115.151 jiwa, kemudian mengalami penurunan sebesar -0,086 persen menjadi 99.853 jiwa di tahun 2007. Sedangkan jumlah pengangguran terkecil di Kota Cilegon pada tahun 2006 sebesar 7.358 jiwa, lalu menurun di tahun selanjutnya yaitu 2007 sebesar 6.945 jiwa atau sekitar -94,3 persen.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Selain itu di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Angka Harapan Hidup (AHH), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2002 sampai 2012 setelah terjadinya pemekarang. Untuk pengolahan data akan digunakan metode regresi *time series* atau data serial waktu

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Kondisi jumlah penduduk miskin di Banten menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun. Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan kecenderungan tinggi antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebesar 0,93%, angka tersebut di dapat setelah pemekaran dan terbesar selama 12 tahun terakhir ini. Beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan

jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat selama periode tersebut, yaitu pada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang (Tabel 1.2).

Penyebab kemiskinan adalah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Rendahnya kualitas sektor Kesehatan (AHH) menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas berakibat rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, sehingga akumulasi modal rendah dan berdampak pada terbatasnya lapangan kerja dan berarti meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Kondisi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012 seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang yang menunjukkan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup tetapi tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.3) padahal menurut penelitian Apriliyah S. Napitupulu (2007), bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Pada sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012 seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita, tetapi tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.4). Secara teoritis seharusnya peningkatan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah penduduk miskin, seperti hasil penelitian Rima Prihartanty (2008), bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Kondisi lain yang dihadapi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012 seperti Kota Tangerang adalah adanya peningkatan jumlah pengangguran tetapi ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.5) padahal menurut penelitian Dian Octaviani (2001), bahwa jumlah pengangguran erat kaitanya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode tahun 2012 setelah pemekaran?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode tahun 2012 setelah pemekaran?
3. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode tahun 2012 setelah pemekaran?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar variabel Angka Harapan Hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran.
2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran.
3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran.

### **1.3.3 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran.
2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran.
3. Sebagai bahan bacaan referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan di Provinsi Banten setelah pemekaran.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan yang ada, dan tujuan diadakannya penelitian.

### **Bab II Telaah Pustaka**

Berisi dasar-dasar dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang sama. Dalam bab ini dimuat kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **Bab III Metode Penelitian**

Berisi penguraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Berisi hasil dan pembahasan analisis data yang dilakukan dan pembahasan tentang hasil analisis tersebut.

**Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta pembahasannya, dan saran yang dapat diberikan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi

kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Lincoln Arshad, 1999).

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincoln Arshad, 1999), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

## 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)* menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup.
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih

#### 4. tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *Internasional Labor Organization* (ILO, 1976).

Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur, yaitu : pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural (Lincoln Arshad, 1999).

#### **2.1.2 Indikator Kemiskinan**

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara

berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai yang berbeda-beda dan biasanya nilai ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

### **2.1.3 Penyebab Kemiskinan**

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

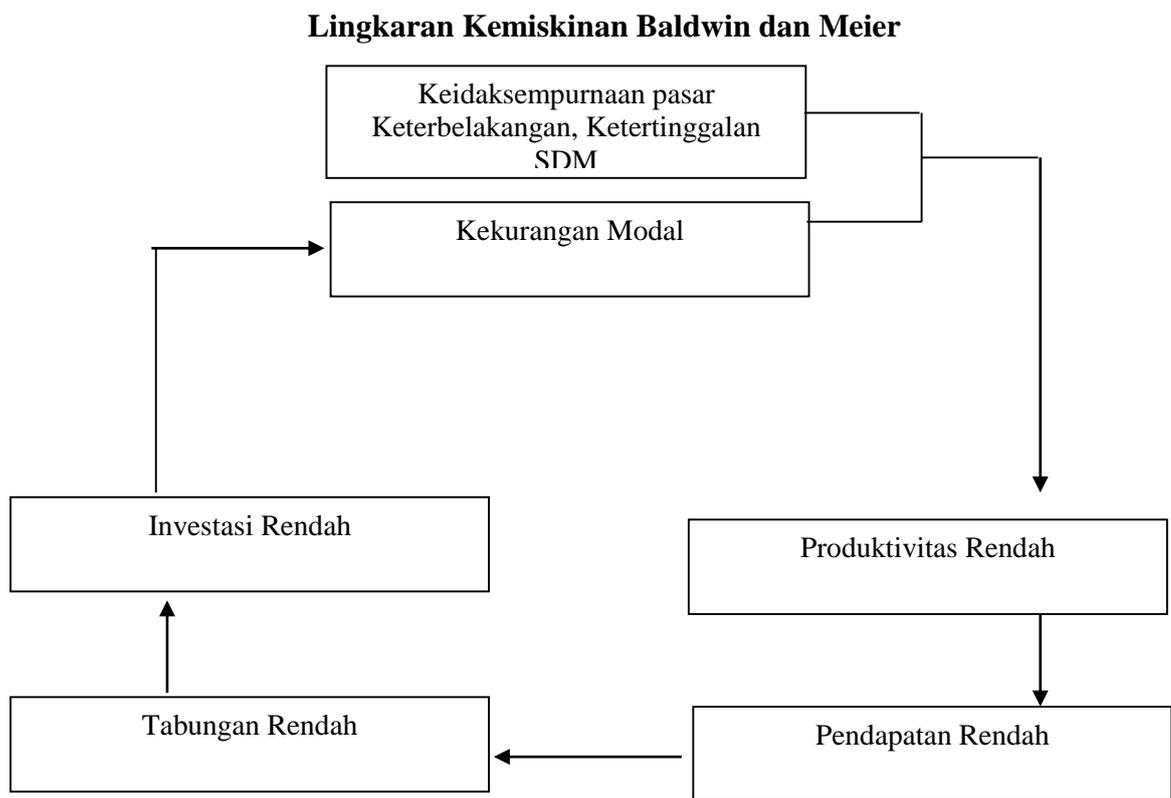
1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

### **2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan**

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar,

dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatanyang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik invetasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “ *a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

**Gambar 2.1**

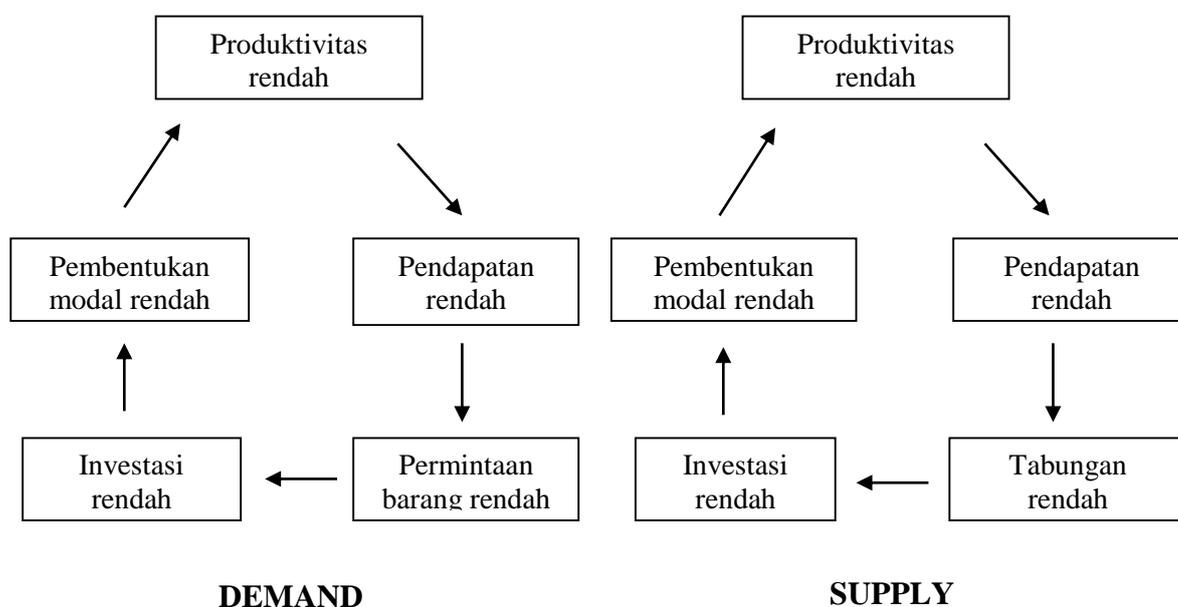


Sumber: Mudrajat Kuncoro, 1997

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkat kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan

masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

**Gambar 2.2**  
**Lingkaran Kemiskinan yang Tidak Berujung Pangkal dari Nurkse**



Sumber: Suryana, 2000

### **2.1.5 Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

### **2.1.6 PDRB per kapita**

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita

dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini

PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

### 3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

#### **2.1.7 Pengangguran**

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sadono Sukirno, 2000).

Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh

3. adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
4. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Menurut Edgar O. Edwards (dalam Lincoln Arsyad, 1999), untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Waktu (banyak diantara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama, misal jam kerjanya per hari, per minggu, atau per bulan).
2. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
3. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumberdaya-sumberdaya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan hal-hal diatas Edwards memberikan bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

3. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sadono Sukirno, 2004).

Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

### **2.1.8 Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat

kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di Negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi.

#### **2.1.9 pengaruh PDRB Per kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan

perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Lincoln Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2000). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

#### **2.1.10 Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Lincoln Arsyad, 1999). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan diberbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia dari tahun 2003 – 2004. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.

Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$MS = f(GR, PDRB, PG)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + U_{it}$$

Dimana:

MS = jumlah kemiskinan.

GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.

PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.

PG = variabel tingkat pengangguran.

*i* = cross section.

*t* = time series.

$\beta_0$  = konstanta.

$B1, B2, B3 = \text{koefisien.}$

$U = \text{error.}$

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Rima Prihartanty (2008) dengan judul "Analisis Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah". Tulisannya meneliti tentang Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi dengan menggunakan panel data dengan OLS. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + U_{it}$$

Dimana:

Y = jumlah penduduk miskin (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

X1 = pertumbuhan ekonomi

X2 = ketimpangan distribusi

$\beta$  = koefisien regresi

U = *disturbance*

$i$  = *intercept cross section*

$t$  = *intercept time*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyah S. Napitupulu (2007) dengan judul "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Utara". Tulisannya meneliti tentang pengaruh indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi linier berganda dengan *ordinary least square/OLS*. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana :

$Y$  = jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa)

$X_1$  = angka harapan hidup (tahun)

$X_2$  = angka melek huruf (persen)

$X_3$  = konsumsi perkapita (rupiah)

$\mu$  = tern of error

$\beta$  = koefisien regresi

$\alpha$  = intercept

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi perkapita mempunyaipengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

- d) Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006) dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$\text{Poverty} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Populasi} + \beta_3 \text{Agrishare} + \beta_4 \text{Industriesshare} \\ + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{SMP} + \beta_7 \text{SMA} + \beta_8 \text{DIPLOMA} + \beta_9 \text{Dummy} \\ \text{Krisis} + \varepsilon$$

Dimana:

Poverty	= tingkat kemiskinan
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
Agrishare	= pangsa sektor pertanian dalam PDRB
Industriesshare	= pangsa sektor industri dalam PDRB
Inflasi	= tingkat inflasi
SMP	= jumlah lulusan setingkat SMP
SMA	= jumlah lulusan setingkat SMA
DIPLOMA	= jumlah lulusan setingkat Diploma

Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar dari pada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.

- e) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh Cutler dan Katz (1991), yaitu :

$$P_t = \beta_0 + \beta_1 (P/Y)_T + \beta_2 \rho_T + \beta_3 \mu_t + \beta_4 G_t + \epsilon_t$$

Dimana :

$P_t$  = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan indeks FGT

$(P/Y)_t$  = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

$\rho_T$  = tingkat inflasi

$G_t$  = rasio gini

$\mu_t$  = tingkat pengangguran

$\epsilon_t$  = *error term*

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat di Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Model Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
<p>Deny Tisna Amijaya (2008)</p> <p>“Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”</p>	<p><math>MS = f (GR, PDRB, PG)</math>  <math>Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + U_{it}</math></p> <p>Dimana:            MS = jumlah kemiskinan.            GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.            PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.            PG = variabel tingkat pengangguran.  <i>i = cross section.</i>  <i>t = time series.</i>  <i>B0 = konstanta.</i>  <i>B1, B2, B3 = koefisien.</i>  <i>U = error.</i></p>	<p>Analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.</p>
<p>Rima Prihartanty, 2008</p> <p>Analisis Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah</p>	<p><math>Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + U_{it}</math></p> <p>Dimana:            Y = jumlah penduduk miskin (Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)            X1 = pertumbuhan ekonomi            X2 = ketimpangan distribusi  <math>\beta</math> = koefisien regresi  <i>U = disturbance</i>  <i>i = intercept cross section</i>  <i>t = intercept tim</i></p>	<p>Regresi dengan menggunakan panel data dengan OLS</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukan dengan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang diukur dengan banyaknya jumlah penduduk miskin sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan angka Gini Rasio berpengaruh positif terhadap kemiskian.</p>

<p>Apriliyah S. Napitupulu (2007)</p> <p>Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara</p>	$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$ <p><i>Dimana :</i>  <math>Y</math> = jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa)  <math>X_1</math> = angka harapan hidup (tahun)  <math>X_2</math> = angka melek huruf (persen)  <math>X_3</math> = konsumsi perkapita (rupiah)  <math>\mu</math> = <i>tern of error</i>  <math>\beta</math> = koefisien regresi  <math>\alpha</math> = <i>intercept</i></p>	<p>Regresi linier berganda dengan ordinary least square / OLS</p>	<p>Dari ketiga variabel yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi perkapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.</p>
<p>Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006)</p> <p>“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”</p>	$\text{Poverty} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Populasi} + \beta_3 \text{Agrishare} + \beta_4 \text{Industriesshare} + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{SMP} + \beta_7 \text{SMA} + \beta_8 \text{DIPLOMA} + \beta_9 \text{Dummy Krisis} + \varepsilon$ <p><i>Dimana:</i>  Poverty = tingkat kemiskinan  PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  Agrishare = pangsa sektor pertanian dalam PDRB  Industriesshare = pangsa sektor industri dalam PDRB  Inflasi = tingkat inflasi  SMP = jumlah lulusan setingkat SMP  SMA = jumlah lulusan setingkat SMA  DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma  Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi</p>	<p>Analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.</p>	<p>Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan Jumlah Penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar dari pada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.</p>

## 2.0 Kerangka Pemikiran

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks.

Penduduk miskin menurut BPS (2010) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk

dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse 1953. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin, salah satunya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Todaro (2000) pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Sehingga pembangunan manusia memiliki peranan kunci dalam membentuk kemampuan

sebuah negara dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Apriliyah S. Napitupulu (2007) mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakintinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

PDRB per kapita merupakan suatu masalah yang sangat berhubungan dengan jumlah penduduk miskin. Menurut Sadono Sukirno (2000) laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Lincoln Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2001). Hal ini

berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

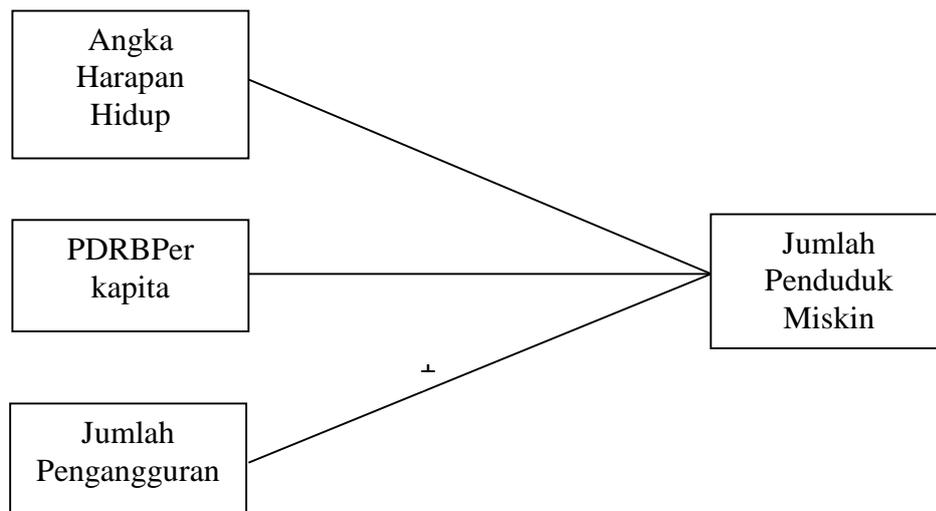
Jumlah pengangguran juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dengan kondisi masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur tidak memiliki penghasilan, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi seperti ini akan membawa dampak bagi terciptanya kemiskinan (Lincoln Arsyad, 1999).

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut :

**Gambar 2.3**

**Kerangka Pemikiran**



**2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.
2. PDRB Per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.
3. Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. (M. Nasir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independent dan variabel dependen.

##### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2012.

##### **2. Variabel Independen**

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran.

Sedangkan definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

##### **1. Jumlah penduduk miskin**

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis

kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam satuan jiwa.

## 2. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

## 3. PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk di setiap wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah (BPS). Data PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita tahun 2012 atas harga konstan tahun 2000. Variabel ini memiliki satuan rupiah.

## 4. Jumlah Pengangguran

Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekaerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari

kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Data jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah pengangguran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2012. Variabel ini memiliki satuan jiwa.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis jumlah penduduk miskin, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data jumlah penduduk miskin, data Angka Harapan Hidup, data PDRB per kapita, dan data jumlah pengangguran. Data yang digunakan sebagai latar belakang berupa tahun periode 2002-2012. Sedangkan data yang digunakan sebagai observasi adalah data panel (*pooled data*) di Provinsi Banten tahun 2012.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebanyak 4 Kabupaten dan 4 Kota. Tahun yang dipilih adalah tahun 2002 sampai dengan tahun 2012.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Meliputi data jumlah penduduk miskin, data Indeks Pembangunan Manusia, data PDRB per kapita, dan data jumlah pengangguran.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2012.

#### **3.5.1 Analisis Regresi**

Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen (Gujarati, 1999). Dalam analisis ini dilakukan bantuan program *Eviews 4.1* dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

$$POV_t = \beta_0 \cdot AHH_t^{\beta_1} \cdot PDRBK_t^{\beta_2} \cdot U_t^{\beta_3} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan :

$POV_t$  = Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2012.

$AHH$  = Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2012.

$PDRBK_t$  = PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008.

$U_t$  = Jumlah pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah tahun 2008.

Namun dikarenakan adanya perbedaan satuan hitung masing-masing variabel independen, maka analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Log}(\text{POV}_t) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(\text{AHH}) + \beta_2 \text{Log}(\text{PDRBK}_t) + \beta_3 \text{Log}(\text{U}_t) + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Alasan menggunakan analisis regresi dalam transformasi log adalah (Gujarati, 1999):

1. Parameter ( $\beta$ ) dapat langsung menunjukkan koefisien elastisitas, yaitu persentase perubuhan dalam variabel dependen untuk persentase perubahan tertentu dalam variabel independent.
2. Gejala heterokedastisitas dapat dikurangi karena tranformasi logaritma akan dapat memperkecil skala variabel-variabel yang diukur.

### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan  $\mu_t$  memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera Test* (J-B *Test*) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Gujarati, 2003).

Model yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

$$JB = n \left[ \frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \sim X^2 \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

S = koefisien skewness

K = koefisien kurtosis

H<sub>0</sub> = data berdistribusi normal

H<sub>a</sub> = data tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0.05 berarti JB statistik tidak berbeda dengan 0 atau tidak menolak H<sub>0</sub>. Jika nilai probabilitas JB lebih kecil dari 0.05 maka H<sub>0</sub> ditolak.

### 3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan log pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Langrange Multiplier* (LM).

Dari hasil uji LM apabila nilai Obs\*R-squared lebih besar dari nilai  $X^2$  tabel dengan *probability*  $X^2 < 5\%$  menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs\*R-squared lebih kecil dari nilai  $X^2$  tabel dengan *probability*  $X^2 > 5\%$  menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2008).

### 3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2003). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews 4.1. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai  $F$  dan *Obs\*Rsquared*, secara khusus adalah nilai *probability* dari *Obs\*Rsquared*. Dengan uji *White*, dibandingkan *Obs\*R-squared* dengan  $\chi$  (*chi-squared*) tabel. Jika nilai *Obs\*R-squared* lebih kecil dari pada  $\chi$  tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

### 3.4.2.4 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas akan dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih dari  $R^2$  regresi *auxiliary* maka didalam model tidak terjadi multikolinearitas. Model *auxilliary regression* adalah :

$$F_t = \frac{R^2 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_k / (k-2)}{(1-R^2 \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \dots X_k) / (N-k+1)} \dots \dots \dots (3.4)$$

### 3.4.3 Uji Statistik

#### 3.4.3.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

- 1) Uji t untuk variabel Angka Harapan Hidup (AHH)
  - a)  $H_0 : \beta_1 = 0$  (tidak ada pengaruh antara Angka Harapan Hidup dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten).
  - b)  $H_1 : \beta_1 < 0$  (ada pengaruh negatif antara Angka Harapan Hidup dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten).
  - c) Bila t hitung  $>$  t table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 2) Uji t untuk variabel PDRB per kapita (PDRBK)
  - a)  $H_0 : \beta_2 = 0$  (tidak ada pengaruh antara PDRB per kapita dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten).
  - b)  $H_1 : \beta_2 < 0$  (ada pengaruh negatif antara PDRB dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten).
  - c) Bila t hitung  $>$  t table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- 3) Uji t untuk variabel Jumlah Pengangguran (U)
  - a)  $H_0 : \beta_3 = 0$  (tidak ada pengaruh antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten).

- b)  $H_1 : \beta_3 < 0$  (ada pengaruh negatif antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten).
- c) Bila  $t$  hitung  $>$   $t$  table maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel maka  $H_0$  tidak ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

#### **3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan (Gujarati, 2003) :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$H_1$  : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(N-K)} \dots\dots\dots(3.5)$$

Dimana :

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- 2)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### 3.4.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana apabila nilai  $R^2$  mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data,  $R^2$  menghadapi masalah karena tidak

memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R<sup>2</sup>* yang dirumuskan:

$$AdjR^2 = 1 - (-R^2) \left( \frac{n-1}{n-k} \right) \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana:

- R<sup>2</sup> : koefisien determinasi
- k : jumlah variabel independen
- n : jumlah sampel